EVALUASI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN DAERAH (BOPDA) DI SDN TEMBOK DUKUH SURABAYA

Dinda Sukmawati
S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA (dindasukmawati808@yahoo.co.id)

Tjitjik Rahaju, S.Sos, M.Si

Abstrak

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diberikan kepada semua siswa-siswi baik anak orang mampu ataupun anak orang tidak mampu. Dananya di ambil dari dana APBN. Kemudian, daerah-daerah telah berinovasi untuk memberikan bantuan dana yang biayanya diambil dari dana APBD. Hal ini yang telah dilakukan oleh kota Surabaya dengan memberikannya dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada masyarakat yang asli kota Surabaya.

Dana BOPDA ini diberikan kepada semua siswa siswi dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Terkait hal ini, semua sekolah dasar baik negeri maupun swasta telah menerima dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya, termasuk SDN Tembok Dukuh. Program BOPDA ini diberikan kepada sekolah yaitu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Diharapkan adanya program BOPDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program pemberian BOPDA bagi SDN Tembok Dukuh Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun narasumber penelitian ini diantaranya adalah Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Bendahara dana BOPDA dan Orang tua murid di SDN Tembok Dukuh Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, metode observasi, dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Tembok Dukuh telah menerima dana BOPDA sejak tahun 2008. Program BOPDA muncul karena adanya sumber anggaran yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BOPDA dialokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Surabaya. Dana BOPDA dipakai untuk melaksanakan setiap program/ kegiatan yang di adakan oleh sekolah. Besaran dana BOPDA untuk para murid SDN Tembok Dukuh adalah Rp,29.000/murid setiap bulannya. Di SDN Tembok Dukuh ini telah mengalami kendala dalam proses pencairan yaitu adanya keterlambatan pencairan dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya kepada SDN Tembok Dukuh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh sudah baik, karna komite sekolah di SDN Tembok Dukuh telah menjalankan penyaluran dana BOPDA sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya yang berlaku.

Saran yang diberikan untuk penelitian ini adalah agar program bisa berjalan baik, maka sebagai pemerintah kota Surabaya perlu mewujudkan dengan baik adanya sekolah gratis yang dananya diambil dari dana APBD kota Surabaya. Sehingga, masyarakat yang asli KK Surabaya dapat menjangkau dan menerima dana bantuan BOPDA untuk kepentingan pendidikan yang ada di sekolah.

Kata kunci: Pendidikan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA)

Abstract

BOS is a government program that is basically the provision of funding for nonpersonnel operating costs for primary education as an executor unit 9-year compulsory program. School Operational Assistance (BOS) is given to all students either child or children of the people can afford not afford. Funds taken from the state budget funds. Then, the areas have been innovating to provide financial aid costs are taken from the budget funds. This has been done by the city of Surabaya to give it and the Regional Education Operational Aid (BOPDA) to the public of the original city of Surabaya.

BOPDA funds is given to all students from primary school to secondary level. Related to this, all elementary schools both public and private has received funding from the municipality BOPDA Surabaya, including Wall SDN Dukuh. The school has been awarded funding BOPDA began in July 2008. The program BOPDA is given to schools that aim to ease the burden on the public to finance compulsory education in the context of 12 years of quality. BOPDA expected that the program can also play a role in accelerating the achievement of minimum service standards in schools. Surabaya City Government gives the Regional Education Operational Aid (BOPDA) in public schools to provide educational services without membebanni parents or guardians of students to pay school fees.

This study aimed to describe the evaluation of the implementation of the program providing for SDN BOPDA Wall Dukuh Surabaya. The method used is descriptive qualitative approach. The sources of this study include the Principal, School Committee, Treasurer BOPDA funds and Parents in the Wall SDN Dukuh Surabaya. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation methods. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentation, and conclusion.

The results showed that Wall SDN Dukuh have received funding since 2008. The program BOPDA BOPDA arise because of the sources of budgetary funds from Anggaran Income and Expenditure (APBD). BOPDA funds allocated to all education providers who are in town Surabaya. Dana BOPDA used to implement each program / activity held by the school. BOPDA amount of funds for the students of SDN Dukuh Wall is Rp, 29,000 / student per month. SDN Dukuh Wall has experienced problems in the liquefaction process is the delay in the disbursement of funds BOPDA of Surabaya city government to the wall SDN Dukuh. In this study indicate that the program evaluation BOPDA SDN Dukuh Wall is good, because the school committee at SDN Dukuh Wall has run BOPDA distribution of funds in accordance with the rules applicable Mayor.

Advice given to this study is that the program can run well, then as the Surabaya city government needs to realize well the free schools are funded by the city budget funds Surabaya. Thus, the original KK Surabaya community can reach out and receive funds BOPDA for educational purposes in schools.

Keywords: Education, School Operational Assistance (BOS) and Operational Support Local Education (BOPDA)

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Semakin baik tingkat pendidikannya, maka akan semakin baik tingkat kualitas sumber daya manusia. Dalam UUD 1945 pasal 31 ayat (1), yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, sedang ayat (2), setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, serta menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pembelajaran nasional yang memberikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan

dan belanja negara maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Hal tersebut mempertegas kewajiban pemerintah dalam mengupayakan akses yang mudah bagi masyarakat dalam mengenyam pendidikan seperti tujuan yang harus dicapai oleh pemerintah yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan hal tersebut hanya dapat dicapai jika ada akses yang baik bagi masyarakat.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 tahun 2008 tentang “Wajib Belajar” dalam pasal 9 ayat 1 telah menyebutkan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa

memungut biaya, serta wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat". Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat dengan menjamin bahwa peserta didik tidak terbebani oleh biaya pendidikan. (Sumber: : www.kemenag.go.id/file/dokumen/PP4708.pdf)

Sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar merupakan sektor yang paling penting dalam menentukan perjalanan bangsa dikemudian hari. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang serius dan berkomitmen untuk daerah terhadap pendidikan dasar dengan diperlihatkannya adanya penyediaan anggaran yang memadai, karena anggaran dalam suatu daerah merupakan parameter yang paling utama dalam memperlihatkan prioritas yang dilakukan oleh sebuah pemerintah (Sumber: www.journal.unair.ac.id).

Dalam mendukung konteks sekolah gratis, pemerintah di Indonesia telah meluncurkan suatu program dalam bidang pendidikan yaitu dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada semua siswa-siswi baik anak orang mampu atau anak orang tidak mampu. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan, maka pemerintah Indonesia telah berupaya menyediakan biaya gratis bagi pendidikan yaitu melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program BOS ini diberikan untuk membantu meringankan biaya sekolah bagi para siswa siswi di Indonesia. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini muncul sejak bulan Juli 2005. Dana BOS ini diberikan untuk tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana

BOS. Program Bantuan Operasional Sekolah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Sasaran program BOS adalah semua sekolah SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bahwa biaya operasional sekolah ditentukan oleh jumlah peserta didik dan beberapa komponen biaya tetap yang tidak tergantung dengan jumlah peserta didik. Pemberian dana BOS diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya. Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa diharapkan pemebrian dana BOS dapat dilaksanakan seadil-adilnya dan tepat pada sasarannya. Penyaluran dana BOS dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember (Sumber : www.bos.kemdikbud.go.id).

Selain terlaksananya program BOS di pemerintah Indonesia. Daerah-daerah mempunyai inovasi untuk memberikan bantuan dana dari keuangan APBD untuk kepentingan pendidikan yang berada di daerahnya. Hal ini yang dilakukan oleh kota Surabaya. Pemerintah kota Surabaya telah memberikan dana bantuan untuk warga asli Surabaya agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya. Dalam hal ini, pemerintah kota Surabaya mempunyai cara lain untuk mencerdaskan tingkat pendidikan masyarakatnya. Pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Daerah setempat telah meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk sekolah negeri dan swasta. Program ini ditujukan untuk tingkat pendidikan dasar sampai tingkat pendidikan menengah ke atas.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) merupakan petunjuk teknis penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya pada sektor pendidikan yang memperoleh 36%. Terbitnya Perwali kota Surabaya ini dalam rangka pendampingan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2011 yang perlu di dukung dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Biaya

Operasional Pendidikan. Tujuan diterbitkannya Perwali tersebut agar pengelolaan biaya operasional sekolah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir tingkat penyalahgunaan dana yang mengarah pada permasalahan pidana korupsi.

Program BOPDA dilaksanakan di kota Surabaya pada tahun 2008 yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dari tingkat SD sampai SMA/SMK dengan memberikan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) kepada seluruh siswa-siswi tanpa terkecuali. Penyaluran program BOPDA kota Surabaya ini hanya diberikan kepada masyarakat/ siswa-siswi yang asli KK (Kepala Keluarga) kota Surabaya. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan bahwa *“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional”*.

Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA), besar biayanya dihitung berdasarkan jumlah siswa yang berasal dari kota Surabaya dengan ketentuan Rp 348.000,-siswa/tahun. Dalam penyalurannya, dana BOPDA diberikan selama 3 periode yang diberikan di awal triwulan/ tiga bulan sekali. Pengguna anggaran dalam BOPDA adalah Kepala Dinas Pendidikan kota Surabaya. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya adalah Kepala Sekolah Negeri di kota Surabaya.

Proses pencairan dana BOPDA pertama-tama yaitu dikucurkan oleh Pemerintahan kota Surabaya dan diberikan kepada Dinas Pendidikan Surabaya, kemudian di transfer ke rekening sekolah setelah itu Kepala Sekolah dan Bendahara mengambil ke Bank Jatim (Jawa Timur). Dana BOPDA ini diberikan kepada semua siswa-siswi yang asli KK kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan berita yang telah beredar di kota Surabaya. Dimana dana BOPDA diperuntukkan kepada siswa siswi dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah atas. Hal yang dibahas dalam penelitian ini adalah penyaluran dana BOPDA untuk sekolah dasar. Sekolah dasar merupakan sekolah yang paling utama diduduki para masyarakat sebelum naik ke tingkat berikutnya.

Sekolah dasar di kota Surabaya telah banyak didirikan untuk meningkatkan dunia pendidikan yang semakin maju di kota Surabaya. maka pemerintah kota Surabaya telah mendirikan sekolah-sekolah, baik dari sekolah swasta maupun sekolah negeri. Sekolah dasar (SD) yang berada di kota Surabaya sebanyak 502 sekolah dasar negeri (SDN) yang tersebar di seluruh kota Surabaya. Sekolah Dasar merupakan sekolah yang memiliki kepentingan utama dalam meningkatkan sekolah ke jenjang berikutnya. Ini terjadi karena Sekolah Dasar menjadi penopang utama untuk bisa melanjutkan ke SMP maupun SMA/ SMK. Terkait hal ini, semua sekolah dasar baik negeri maupun swasta telah menerima dana BOPDA dari pemerintah kota Surabaya, termasuk SDN Tembok Dukuh. Sekolah tersebut telah diberikan dana BOPDA mulai bulan Juli tahun 2008.

Program BOPDA ini diberikan di semua sekolah terutama sekolah dasar yaitu bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOPDA juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Alasan, Pemerintah Daerah Kota Surabaya memberikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) pada sekolah negeri untuk memberikan pelayanan pendidikan tanpa membebani orangtua atau wali siswa untuk membayar biaya sekolah. Pembebasan biaya disertai dengan larangan segala jenis pungutan oleh sekolah kecuali biaya personal siswa sendiri.

Program BOPDA ini hanya di berikan kepada masyarakat kota Surabaya. Upaya tersebut dilakukan pemerintah kota Surabaya untuk melindungi hak masyarakat Surabaya agar masyarakat Surabaya memperoleh pendidikan yang layak. Program ini dilakukan untuk memperketat jalur penerimaan siswa luar kota di tiap tahunnya. Dana BOPDA diberikan kepada semua sekolah ataupun pada jenjang pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat menengah ataupun kejuruan yang ada di kota Surabaya. Program BOPDA ini telah membawa konsekuensi adanya larangan melakukan pungutan biaya kepada wali murid.

Evaluasi kebijakan ini penting untuk dilakukan karna mengingat studi ini merupakan wilayah kajian ilmu kebijakan negara dan menjadi fenomena menarik dalam kehidupan nyata. Setiap kebijakan hendaknya dilakukan evaluasi guna untuk mengetahui apakah

suatu kebijakan tersebut sudah mencapai tujuan dan sasaran yang di harapkan atau belum dalam suatu kebijakan. Dalam hal ini karena masih adanya permasalahan yang timbul dengan terjadinya penyelewengan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOPDA). Masalah ini terjadi karena tidak adanya pertanggung jawaban antara yang dikatakan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan fakta sesungguhnya. Misalnya, dalam pengadaan alat perkantoran, renovasi fisik sekolah serta pengadaan sarana prasarana yang tidak terbukti ada dalam SPJ yang dilampirkan.

Masalah tersebut menjadi penting untuk diteliti karena masih banyaknya permasalahan dan penyimpangan dana pendidikan khususnya dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di kota Surabaya yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi program BOPDA karena di kota Surabaya banyak ditemukan permasalahan dengan adanya indikasi penyelewengan pada regulasi pelaksanaan penyelenggaraan dana BOPDA. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut, “Adanya penggunaan BOPDA tidak sesuai aturan, penggunaan dana BOPDA cenderung digunakan untuk membeli keperluan yang tidak penting. Sehingga kurang efektif dalam menunjang kegiatan belajar mengajar siswa sebagai penerima dana BOPDA (Sumber: www.beritaonlinesurabayakita.com).

Dengan melihat permasalahan diatas tentunya menarik apabila Penulis meneliti mengenai Evaluasi program Bantuan Operasional Daerah (BOPDA), karena tidak diberikannya langsung dana BOPDA kepada siswa akan tetapi diterima dan dikelola langsung oleh sekolah bersamaan dengan pengawasan dari komite sekolah, selain itu pelaksanaan program BOPDA setelah sekian lama dari tahun ketahun mendapatkan evaluasi tetapi kenyataannya keefektifan dari tujuan sasaran yang dituju masih belum maksimal, banyaknya tantangan dan kendala dalam transparansi serta akuntabilitas dari berbagai lembaga yang menangani masih banyak perlu dievaluasi, baik oleh lembaga sekolah maupun lembaga lain sehingga setidaknya sedikit banyak dapat mengatahui seberapa besarkah manfaat dan cakupan, pemerataan dari anggaran BOPDA bagi siswa/siswi miskin atau kurang mampu. Dalam hal ini dana BOPDA di SDN Tembok Dukuh juga sering mengalami keterlambatan dalam pencairannya. Sehingga, peneliti ingin mengangkat judul penelitian “**Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah di SDN Tembok Dukuh Surabaya.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti memakai rumusan masalah mengenai Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Tembok Dukuh Surabaya ?

C. Tujuan

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program pemberian BOPDA bagi SDN Tembok Dukuh Surabaya.

KAJIAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah “kebijakan (policy)” berasal dari bahasa Yunani dan Sansekerta “*polis*” (negara, kota) yang kemudian masuk ke dalam bahasa latin yang menjadi “*politia*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah, masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Menurut Wilson (dalam Wahab, 2012:13) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai berikut:

“The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)” (tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan dari pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, apabila langkah-langkah yang telah diambil atau telah gagal di ambil untuk diimplementasikan, serta memberikan penjelasan-penjelasan mengenai apa yang terjadi atau tidak terjadi).

B. Evaluasi Kebijakan Publik

a. Definisi Evaluasi Kebijakan Publik

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan program pemberian BOPDA bagi SDN Tembok Dukuh Surabaya. Evaluasi kebijakan publik (*public policy evaluation*) dalam studi kebijakan publik (*public policy study*) merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (*public policy process*). Menurut Widodo (2009: 111)

Evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Muhadjir dalam Widodo (2009: 112), mengatakan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan dapat membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

b. Tujuan Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2008:120), evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisien suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau putput dari suatu kebijakan.

c. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi memiliki fungsi dalam analisis kebijakan menurut Dunn (2003: 609), antara lain sebagai berikut :

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klasifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberikan sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

d. Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Dalam melakukan evaluasi kebijakan selain menentukan tipe evaluasi tetapi juga harus menentukan pendekatan-pendekatan apa yang akan digunakan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Menurut Dunn (2003 : 613) pendekatan-pendekatan dalam evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan evaluasi semu

Evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.

2) Pendekatan evaluasi formal

Evaluasi formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan, tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program.

3) Evaluasi Keputusan Teoritis

Evaluasi keputusan teoritis (decision-theoretic evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

e. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan publik menurut Dunn (2003:429) merumuskan 6 (enam) criteria dalam evaluasi adalah sebagai berikut :

1) Efektivitas

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu kebijakan yang

dilaksanakan mencapai hasil yang diharapkan.

2) **Efisiensi**

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat usaha tertentu. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan atau program yang dijalankan.

3) **Kecukupan**

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

4) **Pemerataan**

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan.

5) **Responsivitas**

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu.

6) **Ketetapan**

Ketetapan berhubungan erat dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Tembok Dukuh Surabaya ini menggunakan penelitian deskriptif. Seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiono (2011: 11) Penelitian deskriptif dipilih untuk menggambarkan apa yang telah terjadi dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai evaluasi Program bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Tembok Dukuh Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian

dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*), kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dijadikan untuk penelitian adalah SDN Tembok Dukuh Surabaya yang beralamat di jalan Demak nomer 45, kecamatan Bubutan, kelurahan Tembok Dukuh Surabaya. Alasan peneliti melakukan penelitian di SDN Tembok Dukuh karena SDN Tembok Dukuh merupakan SDN yang Lingkungan sekolahnya merupakan kawasan yang dulunya terdiri dari dua sekolah yaitu: SDN tembok Dukuh 1 dan SDN tembok Dukuh 2.

C. Fokus Penelitian

Di dalam membantu pelaksanaan penelitian maka diperlukan fokus penelitian yang tepat dan sesuai dengan tujuan dan masalah dalam penelitian tersebut agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tepat sasaran. Penelitian ini membahas mengenai evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh Surabaya. Berkaitan dengan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah berdasarkan Kriteria Evaluasi Teori mengenai evaluasi program BOPDA menurut teori William Dunn yang meliputi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketetapan.

D. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:216) pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi social tertentu akan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang mengetahui tentang situasi social tersebut, kemudian menentukan sumber data pada orang yang diwawancarai dengan menggunakan teknik *Purposive*.

Menurut Sugiyono (2006) teknik *Purposive* adalah teknik penentuan Subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu". Adapun dasar yang dijadikan pertimbangan pemilihan subjek adalah pada aktor yang terlibat dalam program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Tembok Dukuh. Pengumpulan data sebagai pendukung untuk memperoleh informasi tentang Evaluasi program dana BOPDA di SDN Tembok Dukuh Surabaya yang dilakukan dengan menggunakan subjek penelitian yang ditentukan berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan

tertentu. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Sekolah
2. Komite sekolah
3. Bendahara dana BOPDA
4. Ibu Sri Wahyuni, selaku orang tua murid dari kelas I.
5. Ibu Siti Aisyah, selaku orang tua murid dari kelas III.
6. Ibu Wijayanti, selaku orang tua murid dari kelas IV.
7. Ibu Siti Aminah selaku orang tua murid dari kelas V.
8. Ibu Rohana selaku orang tua murid dari kelas VI.

E. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland dan lofland dalam Moleong (2011: 157) menyatakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumberdata dalam penelitian digunakan sebagai sumber informasi yang mendukung penulis.

Adapun prosedur pengambilan data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 (dua) jenis data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, baik dengan wawancara, observasi, dan data-data dari sekolah. Sumber data ini berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak atau instansi yang terkait dengan berdasarkan obyek yang akan di teliti secara langsung mengenai program BOPDA di SDN Tembok Dukuh Surabaya. Dalam hal ini adalah terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara dana BOPDA, dan Orang tua murid.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari berbagai macam sumber lainnya yang sesuai sebagai pendukung. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan membuka, mencatat dan mengutip data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dapat mendukung terlaksananya penelitian ini. Dalam hal ini data-data yang diperoleh peneliti berupa dokumen dari Dinas Pendidikan kota Surabaya dan penelitian

terdahulu tentang dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA).

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:157) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian sangat mendukung akan kualitas data yang diperoleh karena kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data. Dalam teknik penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi :

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2011: 186).

Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendukung data mengenai pelaksanaan program BOPDA serta untuk mengevaluasi program dana BOPDA. Wawancara ini dilakukan dengan informan yang ada dilokasi penelitian terutama untuk mendapatkan data primer dari para Tim Manajemen BOPDA sekolah. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, komite sekolah, bendahara sekolah, dan orang tua murid sejumlah 5 orang.

Wawancara tersebut dilakukan untuk membantu peneliti dalam mendapatkan data dari para informan sebagai kunci informan. Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji evaluasi program BOPDA. selain itu orang tua murid dan murid dijadikan informan penunjang, karena mereka sebagai penerima program BOPDA dan kepada merekalah pembuktian informan dilakukan.

2. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono 2012:166), Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, proses pengamatan dilakukan pada evaluasi program dana BOPDA di SDN Tembok Dukuh Surabaya.

3. Metode Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (dalam Sugiyono, 2010:240).

Teknik dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data mengenai struktur organisasi komite sekolah, catatan kesesuaian besaran jumlah dana BOPDA yang diterima dengan jumlah murid yang telah di data dan catatan penggunaan dana BOPDA dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi SDN Tembok Dukuh

Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, jujur, dapat dipercaya, berilmu, cerdas, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahpikir, olahraga, olahhati dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan

dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis sumber daya alam Indonesia. Dalam hal ini pemerintah kota Surabaya telah mewajibkan masyarakat untuk wajib belajar 12 tahun. Tujuannya untuk membantu masyarakat Surabaya agar bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat atas. Dengan begitu pendidikan yang harus dilalui terlebih dahulu adalah tingkat sekolah dasar, dimana sekolah dasar merupakan lembaga yang dikelola dan diatur oleh pemerintah yang bergerak di bidang pendidikan yang diselenggarakan secara formal yang berlangsung selama 6 tahun dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk siswa siswi di seluruh Indonesia.

Pemerintah Surabaya telah mendirikan banyak sekolahan mulai dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Hal ini dilakukan, agar masyarakat Surabaya bisa memilih sekolah yang mereka inginkan untuk dijadikan tempat belajar. Misalnya didirikannya SDN Tembok Dukuh yang berada di kota Surabaya bagian utara.

SDN Tembok Dukuh adalah salah satu sekolah yang berdiri sejak jaman Belanda, berlokasi di Kelurahan Tembok Dukuh, kecamatan Bubutan dengan jarak 2 km dari pusat pemerintahan kota Surabaya. Sekolah ini beralamat di jalan Demak nomor 45 Surabaya. Sekolah ini pagunya mengikuti Surabaya pusat. SDN Tembok Dukuh merupakan sekolah merger yang telah terjadi penggabungan dua lembaga yaitu SDN Tembok Dukuh I-83, dan SDN Tembok Dukuh II-84 berdasarkan SK Merger No188.45/201/436/1.2/2007.

SDN Tembok Dukuh telah memiliki siswa sebanyak 884 siswa, yang telah terdiri dari kelas I sampai kelas VI. Jumlah siswa tersebut telah di bagi antara laki-laki dan perempuan. Yang terdiri dari laki-laki sejumlah 433 siswa dan perempuan sejumlah 451 siswa. Sekolah ini juga telah memiliki 33 guru. Jumlah guru tersebut telah tergolong PNS maupun Honorer.

Dilihat dari sudut input cukup banyak calon siswa yang mendaftar tiap tahunnya (lebih dari 200 siswa). Dengan demikian, SDN Tembok Dukuh Surabaya tergolong cukup diminati oleh masyarakat. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, ada beberapa prestasi yang telah dicapai oleh sekolah, antara lain pada tiga periode lulusan sebanyak 197 siswa (100% lulus ujian akhir sekolah), dan hasil nilai UN tahun 2012 / 2013 kategori nilai rata-rata Bahasa Indonesia

= A, IPA = A dan untuk Matematika = A. Disamping itu prestasi non akademis a.l pada lomba POR SD tahun 2011 meraih kemenangan juara II pada cabang lari estafet, catur juara III, tenis meja juara III di tingkat kecamatan. Lomba Pentas Seni tahun 2011 meraih juara I Vokal tunggal tingkat kecamatan, 3 piala untuk lomba paduan suara, samroh dan puisi serta lomba Karakter Budi Pekerti Bhs Jawa tahun 2012 meraih 2 piala juara III & I. Juara harapan III vokal tunggal tingkat Kota Surabaya. (Sumber: Data sekolah SDN Tembok Dukuh, tahun 2014-2015)

Harapan Kepala Sekolah, guru dan para stakeholder SDN Tembok Dukuh adalah sbb : Sekolah telah menampung Anak Usia Sekolah Dasar sebanyak 160 siswa, sesuai dengan pagu yang ditetapkan oleh Dispendik Kota Surabaya, Kualifikasi akademis tenaga pendidik semuanya sudah S1 dan semuanya sudah ikut sertifikasi pendidikan, Memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, Siswa lulusan kelas VI sudah 80% masuk SMP Negeri.

Potensi Karakteristik SDN Tembok Dukuh : Dalam pengembangan ekstrakurikuler Tari Remo, Tari Anak, Paduan suara dan Samroh, ludruk, teater, vokal, melukis sering mengikuti lomba baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota, Untuk mensukseskan program walikota tentang pemanfaatan sampah daur ulang, SDN Tembok Dukuh pernah mengikuti lomba Cipta Karya daur ulang, Kegiatan keagamaan khususnya agama Islam selalu mengadakan Peringatan hari - hari besar agama a.l : Maulud Nabi Muhammad SAW, Isro' Mi'roj, Tahun Baru Hijriah dan hari Raya Idul Adha.

Dasar Hukum dalam Pendidikan Nasional :

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat 2 bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

2. Pelaksanaan Program BOPDA di SDN Tembok Dukuh Surabaya

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) adalah sejumlah anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan diperuntukkan bagi Sekolah Dasar Negeri (SDN)/ Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN)/ Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)/ Sekolah Menengah Pertama Negeri Terbuka (SMPNT)/ Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN)/ Sekolah Menengah Atas Negeri Terbuka (SMANT)/ Madrasah Aliyah Negeri (MAN)/ Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN). Bantuan Operasional Pendidikan (BOPDA) dikelola agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sekolah dan dianggarkan secara proporsional sesuai dengan kode rekening yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya. Penggunaan dana BOPDA untuk tiap kode rekening wajib mengacu pada definisi operasional kode rekening dan standar satuan harga yang telah ditetapkan. Hal tersebut telah dicantumkan dalam Peraturan Walikota Surabaya tahun 2012.

Sebelum program BOPDA dijalankan oleh kota Surabaya, program yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia adalah program BOS. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program yang dilakukan oleh negara Indonesia untuk membantu masyarakat Indonesia agar bisa menikmati sekolah gratis yang dibiayai dari dana APBN. Program BOS diperuntukkan bagi semua masyarakat yang bersekolah dari tingkat dasar sampai tingkat menengah pertama. Hal ini dilakukan agar masyarakat Indonesia bisa melaksanakan pendidikan gratis tanpa dipungut biaya.

Program Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah (BOS) di mulai sejak tahun 2005. Program BOS ini dijalankan pada saat itu agar tercapainya program wajib 9 tahun. Sedangkan pada tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan orientasi program BOS dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas pendidikan yang bermutu. Sasaran adanya program BOS ini

diperuntukkan bagi sekolah dasar negeri ataupun swasta dan sekolah tingkat menengah pertama baik negeri ataupun swasta. Bantuan ini diberikan setiap periode tiga bulanan, yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, Oktober-Desember.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Pendanaan pendidikan ini berupa peralatan habis pakai, biaya tak langsung seperti daya, air, jasa, uang lembur, transportasi, konsumsi, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak dan lain-lain.

Kota Surabaya telah berinovasi untuk memberikan dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk masyarakat yang asli kota Surabaya. Dalam rangka mewujudkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Program BOPDA diberikan kepada masyarakat Surabaya untuk membantu mereka agar bisa menyelesaikan pendidikan sekolah tanpa dipungut biaya. Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) diberikan kepada semua sekolah negeri maupun swasta, dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas.

Dana BOPDA ini diberikan setiap tiga bulan sekali, gunanya untuk memberikan biaya sekolah gratis bagi semua murid di kota Surabaya. Sehingga dengan diberikannya dana BOPDA ini masyarakat kota Surabaya dapat terbantu untuk mengurangi beban biaya sekolah bagi orang tua murid.

Program BOPDA muncul karena adanya sumber anggaran yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana BOPDA dialokasikan kepada seluruh penyelenggara pendidikan yang berada di kota Surabaya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 2 yang berisi tentang "*Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*".

Dalam UUD 1945 tersebut telah dijelaskan bahwa sektor pendidikan, terutama pendidikan dasar merupakan sektor yang paling penting dan menentukan perjalanan bangsa di kemudian hari sehingga sudah seharusnya Pemerintah memberikan perhatian yang serius, komitmen daerah terhadap pendidikan dasar ini di perlihatkan melalui penyediaan anggaran yang

memadai, karena anggaran merupakan parameter yang paling utama dalam memperlihatkan prioritas yang dilakukan oleh sebuah pemerintah.

Besaran anggaran Bantuan Operasional Pendidikan Daerah untuk masing-masing sekolah ditentukan berdasarkan jumlah siswa yang terdaftar pada sekolah penerima dana BOPDA dengan rincian sebagai berikut : Alokasi anggaran BOPDA sudah ada di masing-masing sekolah dengan jumlah per-siswa sebesar Rp 29.000 (dua puluh sembilan ribu).

Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dialokasikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan Sekolah dan dianggarkan secara proporsional yang sesuai dengan kode rekening yang telah ditetapkan. Penggunaan BOPDA untuk tiap kode rekening wajib mengacu pada definisi operasional kode rekening dan standar satuan harga yang telah ditetapkan.

B. PEMBAHASAN

Sesuai pada pemaparan sebelumnya, bahwa salah satu bentuk dari kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah kota Surabaya adalah program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA). Sebuah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh para pelaksana tentunya memerlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil kebijakan tersebut telah tercapai. Penilaian terhadap hasil kebijakan suatu program dapat dilihat melalui tujuan atau indikator-indikator keberhasilan (*outcome*) terkait program yang dievaluasi.

Menurut Dunn (1999:612), dalam evaluasi formal ada berbagai metode yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya yaitu undang-undang, dokumen-dokumen program dan wawancara dengan pembuat kebijakan suatu program. Dalam kegiatan evaluasi diperlukan indikator. Indikator menurut Suharsimi (2012) dapat didefinisikan sebagai petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan. Diperlukannya adanya indikator untuk mengevaluasi program karena keberhasilan dan ketidakberhasilan suatu kegiatan dapat juga dipengaruhi oleh komponen atau subkomponen lainnya.

Setelah berjalan selama tujuh tahun program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Tembok Dukuh Surabaya memberikan hasil yang cukup positif. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada

penyelewengan yang menunjukkan bahwa program BOPDA masih perlu untuk di evaluasi dalam proses dan penyalurannya. Untuk melihat Hasil dari evaluasi tersebut peneliti menggunakan 6 kriteria evaluasi kebijak publik, yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Dana BOPDA yang dilaksanakan oleh sekolah SDN Tembok Dukuh sudah berjalan dengan baik. Meskipun dalam penyalurannya program ini memiliki kendala. Tetapi penyaluran dananya bisa di atasi dahulu dengan memakai uang dari usaha para pegawai di sekolah SDN Tembok Dukuh. Apabila dana BOPDA yang di salurkan dari pemerintah kota Surabaya belum cair, maka para komite sekolah yang mengurus dana BOPDA memakai dulu uang dari usaha yang dijalankan oleh pegawai di sekolah tersebut. Dana yang dipakai adalah dana dari koperasi sekolah di SDN Tembok Dukuh.

2. Efisiensi

Program BOPDA berjalan mulai tahun 2008. Program ini sudah berjalan selama 7 tahun. Dengan adanya program BOPDA ini, di harapkan masyarakat Surabaya dapat melaksanakan program wajib 12 tahun.

Penyaluran dana BOPDA yang dibagikan kepada siswa SDN Tembok Dukuh di wujudkan berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah untuk mendapatkan keminatan murid dalam mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah. dalam hal ini kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai peraturan Walikota Surabaya. Dalam hal ini dana yang dikeluarkan harus bisa menghemat biaya, agar dana BOPDA bisa di salurkan secara merata kepada murid di SDN Tembok Dukuh.

3. Kecukupan

Dana BOPDA di SDN Tembok Dukuh sudah di salurkan secara menyeluruh dan penyalurannya sudah memuaskan semua murid. Para orang tua murid pun merasa puas dengan pembagian dana BOPDA di SDN Tembok Dukuh. Semua dananya dipakai untuk keperluan murid ataupun kebutuhan sekolah.

4. Pemerataan

Program BOPDA sudah berjalan merata ke semua sekolah. Terutama SDN Tembok

Dukuh. Penyaluran dananya sudah merata kepada murid-murid yang asli kota Surabaya. Dana BOPDA di salurkan untuk membantu masyarakat Surabaya untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun. Dana BOPDA di bagikan kepada semua murid baik sekolah negeri maupun swasta. Program ini diberikan untuk semua sekolah mulai dari tingkat dasar sampai dari tingkat menengah atas.

5. Responsivitas

Pelaksanaan program BOPDA di SDN Tembok Dukuh mendapatkan respon yang baik dari para orang tua murid. Di karenakan mereka merasa terbantuan dengan adanya peluncuran dana BOPDA di sekolah tersebut. Hal ini menyangkut kepada prestasi para murid agar mereka bisa bersekolah dengan jauh lebih baik tanpa adanya perbedaan dengan sekolah yang gratis ini.

6. Ketetapan

Penyaluran dana BOPDA ini dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah selaku pemimpin di SDN Tembok Dukuh. Hal ini dilakukan karena kepala sekolah selalu melakukan semua dana BOPDA dengan transparan tanpa menutup-nutupi setiap pembelian barang yang telah dibeli. Kepala sekolah SDN Tembok Dukuh mengharapakan agar semua kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah, bisa diketahui oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis mengenai Evaluasi Program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di SDN Tembok Dukuh yang sudah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

- 1 Evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh pada tahap kriteria efektivitas dalam penyaluran dananya sudah tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya. Dalam pembagian dananya kepada para murid sudah dijalankan tepat pada waktunya. Sesuai dengan harapan orang tua kepada pihak sekolah. Dana BOPDA ini diberikan karna adanya bantuan dalam hal

pendidikan yang diberikan pemerintah kota Surabaya untuk membantu masyarakat agar bebas dari biaya sekolah.

- 2 Evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh pada tahap kriteria efisiensi dalam penyalurannya telah diberikan kepada para murid yaitu dengan kegiatan-kegiatan baik kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan lainnya. Orang tua murid SDN Tembok Dukuh telah diberikan pengarahan tentang kegunaan dana BOPDA untuk para murid. Dalam pembagian dana BOPDA, sekolah ini telah menyalurkan dananya dengan prosedur-prosedur yang diberikan dinas Pendidikan kota Surabaya.
- 3 Evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh pada tahap kriteria kecukupan dalam pembagian dana BOPDA di sekolah tersebut telah dibagikan secara berkecukupan yang dijalankan sesuai dengan peraturan Walikota Surabaya, bahwa setiap murid menerima dana BOPDA sebesar Rp,29.000 per bulan. Setiap kegiatan yang diadakan oleh SDN Tembok Dukuh, para orang tua murid dibebaskan dari biaya karena biayanya diambil dari dana BOPDA.
- 4 Evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh pada tahap kriteria pemerataan dalam pembagian dana BOPDA sudah berjalan secara merata mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 yang KK aslinya kota Surabaya. Pemerataannya dijalankan melalui kegiatan-kegiatan sekolah.
- 5 Evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh pada tahap kriteria responsivitas bahwa dengan diberikannya dana BOPDA kepada murid SDN Tembok Dukuh ini telah memuaskan para orang tua murid dan mereka merespon baik dengan diberikannya dana BOPDA. Mereka sebagai orang tua juga berharap agar dana BOPDA ini berjalan terus.
- 6 Evaluasi program BOPDA di SDN Tembok Dukuh pada tahap kriteria ketetapan dalam pelaksanaan program BOPDA di sekolah ini sistemnya sudah baik dan telah mengarah kepada peraturan Walikota Surabaya. Selaku komite sekolah yang mengurus dana BOPDA mereka tidak menambahi atau mengurangi dana yang

yang di salurkan kepada murid. Semua dana yang mereka salurkan kepada murid sudah diberikan berdasarkan peraturan Walikota Surabaya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai saran masukan dan bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan bagi pihak terkait dan mengelola program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) khususnya dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik. Adapun saran-saran tersebut yaitu :

- 1 Melalui program Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang dilaksanakan oleh kota Surabaya ini, seharusnya masyarakat umum yang asli KK kota Surabaya tidak perlu cemas untuk memikirkan besarnya biaya pendidikan sekolah yang semakin mahal saat ini, karena pemerintah daerah kota Surabaya telah berusaha mewujudkan adanya sekolah gratis yang dananya diambil dari dana APBD kota Surabaya.
- 2 Pihak sekolah hendaknya tetap menjaga transparansi program BOPDA ini dengan melalui laporan pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas yang berada di kota Surabaya.
- 3 Tugas utama yang sangat penting adalah menambah dana pendidikan kepada setiap sekolah karena dana yang sudah dicanangkan belum bisa menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak sekolah untuk memenuhi biaya pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Dunn, William. 2003. *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

- Subarsono, A.G 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.

Peraturan

- Lampiran Peraturan Walikota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) (online) (www.jdih.surabaya.go.id/pdfdoc/perwali_648.pdf diunduh Kamis 26 Februari 2015)
- Lampiran Data Murid SDN Tembok Dukuh Tahun 2014-2015.
- Lampiran Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Tahun Anggaran 2015 SDN Tembok Dukuh.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Dana BOS (online) (www.bos.kemdikbud.go.id diunduh Sabtu 28 Februari 2015)
- Profil Sekolah Dasar Negeri Tembok Dukuh Surabaya (online) (<http://profilsekolah.dispendik.surabaya.go.id> diakses Selasa, 3 Maret 2015)
- Undang-Undang Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (online) (kemenag.go.id/file/dokumen/PP4708.pdf diakses Senin 9 Maret 2015)

e-Journal

- Aulia, Sitta. 2012. “Desentralisasi Kebijakan Pendidikan” *Jurnal Politik Muda* Vol No 1 (online) (www.journal.unair.ac.id diunduh Minggu 8 Maret 2015)

- Ilyas, Rahman 2012 “Evaluasi Implementasi Bantuan Operasional Sekolah” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (online) (www.jurnal.ub.ac.id diakses Rabu 4 Maret 2015)

- Vitaloka, Ike. 2011 “Implementasi program BOS di SDN Gugus 1 Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik” *Jurnal Administrasi* (online) (www.ejournal.unesa.ac.id diakses Rabu 4 Maret 2015)

- Wijaya, Okta. 2013 “Pelaksanaan dan Pengawasan program BOSDA di Sekolah Dasar Negeri 06 Kubu Raya” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (online) (www.jurnalis.untan.ac.id diakses Rabu 4 Maret 2015)

Berita Online

- Asih, Nyuciek.2014. *Penyelewengan Dana BOS di Madrasah, Kejaksaaan Rencana panggil Kemenag* (online) (www.m.beritajatim.com/ diakses Senin, 26 Januari 2015)

- Surabayakita, Redaksi 2014 “Soal BOS, Kejari Tanjung Perak Periksa Kemenag” (online) (www.surabayakita.com diakses Senin 27 April 2015)